

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perangkat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tersebut, telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Hal ini diduga akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan *stakeholder*.

Jika di masa lalu *stakeholder* pendidikan sepenuhnya ada di tangan aparat pusat, maka pada era otonomi pendidikan sekarang peranan sebagai *stakeholder* itu akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk sekolah yang berada pada jantung komunitas atau masyarakat setempat. Sekolah memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orang tua peserta didik dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang kini digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah atau dalam bahasa Inggris lazim disebut "*School Based Management*" adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota (Depdiknas, 2000 : 4).

“Partisipasi aktif masyarakat terhadap sekolah diwadahi dengan komite sekolah. Keberadaan Komite Sekolah dalam manajemen berbasis sekolah merupakan suatu kepatutan yang tidak bisa diabaikan.” (Nurholis, 2003 : 87). Munculnya konsep manajemen berbasis sekolah memang masih harus terus dikaji dan kajian tersebut hendaknya dimaksudkan untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang kondusif bagi layanan pendidikan, sehingga tercipta kemandirian sekolah dengan menggali sumber daya sekolah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud hasil belajar para peserta didik .

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis ke beberapa SD diperoleh data bahwa 30 SD yang ada di Kecamatan Ciawi belum secara optimal memberdayakan komite sekolah sebagaimana diatur dalam UU, PP, dan Permen yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Komite sekolah. Hal ini menjadi permasalahan terutama jika dihubungkan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Di satu sisi, sekolah menuntut adanya partisipasi masyarakat secara terpadu dan terencana dalam berbagai aspek pendidikan, seperti keuangan, sarana, sumber pembelajaran dan pengelolaannya, pada sisi lain kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan komite sekolah sebagai wakil masyarakat belum optimal.

Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan

hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

Bertitik tolak dengan latar belakang tersebut direncanakan penelitian dengan judul: **“KINERJA KOMITE SEKOLAH HUBUNGANNYA DENGAN MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Penelitian di SDN Citamba Kecamatan Ciawi).”**

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, teridentifikasi beberapa permasalahan yang membutuhkan penelitian, antara lain sebagai berikut :

- a. Komite sekolah belum sepenuhnya menunjang terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar.
- b. Usaha-usaha agar komite sekolah komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah dihadapkan kepada berbagai permasalahan, seperti kesibukan, kesejahteraan dan kepedulian.
- c. Kinerja komite sekolah dipengaruhi oleh faktor intern sekolah dan faktor esktern, sehingga kinerjanya belum optimal sebagaimana tuntutan pada peraturan tentang komite sekolah.
- d. Mutu pembelajaran sekolah dasar pada semua mata pelajaran belum mencapai harapan ideal.

## 2. Pembatasan masalah

Mengingat ruang lingkup permasalahan cukup luas, sedangkan dengan keterbatasan wawasan, biaya, waktu, alokasi dan sarana yang penulis miliki, maka penelitian dibatasi pada kinerja komite sekolah dan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Citamba Kecamatan Ciawi.

### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kinerja komite sekolah di SDN Citamba Kecamatan Ciawi?
2. Bagaimanakah mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Citamba Kecamatan Ciawi?
3. Bagaimana hubungan antara kinerja komite sekolah dengan kualitas pembelajaran PAI di SDN Citamba Kecamatan Ciawi ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Kinerja komite sekolah di SDN Citamba Kecamatan Ciawi.
2. Mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Citamba Kecamatan Ciawi.
3. Hubungan antara kinerja komite sekolah dengan kualitas pembelajaran PAI di SDN Citamba Kecamatan Ciawi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dikelompokkan pada manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kajian dan informasi tentang kinerja Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu Pembelajaran
- b. Menambah hasil penelitian tentang kinerja Komite Sekolah dan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam

### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai input atau masukan bagi Sekolah dan Komite Sekolah untuk bahan kajian dalam rangka meningkatkan mutu Pembelajaran di SD .
- b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan manajemen pemberdayaan Komite Sekolah.
- c. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan tentang komite sekolah dan mutu pendidikan agama Islam di SD.

## **F. Landasan Teori**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal dalam wadah komite sekolah. Hal ini penting karena sekolah merupakan masukan dari masyarakat dalam penyusunan program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan

masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapat program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika Kepala Sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (mutualisma). Dengan demikian, yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi komite tersebut.

Hubungan sekolah dengan masyarakat (1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah (2) untuk menilai program sekolah, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, (6) untuk memberi tahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, (7) untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah (Sutisna, 1989 : 145).

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi yang dihasilkan.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Lampiran Kepmendiknas Nomor 004/U/2002).

Adapun mengenai proses pembelajaran, pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV pasal 19-24 ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Mengingat pada pasal 19 sebagaimana diuraikan di atas maka proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus interaktif, yakni ada komunikasi langsung timbal balik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik . Proses pembelajaran harus mampu mengembangkan inspirasi guru dan peserta didik , berlangsung dalam situasi yang menyenangkan. Mengajar pada hakekatnya merupakan upaya guru dalam memberikan kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. Sebagaimana menurut Gagne & Briggs, (dalam Muhamad Ali, 1998) *"Intruction is a set of event which affect leaners in such a way that learning is facilitated"*. Maksudnya bahwa hal yang terpenting dalam pembelajaran bukan upaya guru menyampaikan bahan, tetapi bagaimana peserta didik secara aktif dapat mempelajari bahan sesuai tujuan. Dari pernyataan ini mengandung pesan bahwa pembelajaran harus mengaktifkan peserta didik untuk melaksanakan proses belajar, dengan kata lain bagaimana guru membelajarkan peserta didik , bukan sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan.

## G. Kerangka Pemikiran dan Paradigma

Belajar merupakan suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap. Perubahan ini bersifat relatif dan berbekas.

Komite sekolah merupakan penghubung antara sekolah dengan masyarakat, yang kinerjanya baik dapat memberikan pengaruh positif bagi pendidikan. Berdasarkan penjelasan di atas kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Paradigma Penelitian





## H. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

Hipotesis nihil ( $H_0$ ), secara signifikan kinerja komite sekolah tidak berhubungan dengan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam.

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ), secara signifikan kinerja komite sekolah berhubungan dengan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam.

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan "t" tes dengan kriteria sebagai berikut: Terima  $H_0$  jika terbukti t hitung lebih kecil daripada t tabel pada taraf signifikansi 5%.